

Penerapan Laporan Keuangan Berkelanjutan berdasarkan PSPK 1 dan PSPK 2 di Indonesia

Dita Hikmawaty Oktavia Ningrum¹, Aliya Dimarizkya², Natasha Elisabeth Manuputty³, Aisya Sheilla Farina Nadia⁴, Daryanto Hesti Wibowo⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Esa Unggul

daryanto.hesti@esaunggul.ac.id

ABSTRACT.

This study discusses the implementation of PSPK 1 and PSPK 2 in sustainability reporting in Indonesia. The Financial Services Authority (OJK) requires public companies in Indonesia to prepare sustainability reports as a form of accountability for environmental, social, and governance (ESG) aspects. PSPK 1 and PSPK 2 serve as the standard basis for assurance services on these reports. However, the quality, consistency, and reliability of ESG data remain major issues. This study examines this phenomenon from the perspective of accounting theory and the accounting challenges in measuring and verifying non-financial information in the transition era to a low-carbon economy. The results of the literature and theoretical studies indicate that sustainability reporting must be regulated in such a way that it is not merely an administrative compliance requirement because it is often considered less relevant to company strategy. Furthermore, there is a need to emphasize the importance of governance structures and sustainability report audit standards (such as PSPK 1 and PSPK 2) to encourage truly accountable reporting that has a real impact on the economy, society, and environment.

Keywords: Accounting Theory; ESG; Sustainability Reporting; PSPK 1; PSPK 2

ABSTRAK.

Kajian ini membahas tentang implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 dalam pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan publik di Indonesia untuk menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). PSPK 1 dan PSPK 2 menjadi dasar standar untuk jasa asurans atas laporan tersebut. Namun, kualitas, konsistensi, dan keandalan data ESG masih menjadi persoalan utama. Studi ini membahas tentang fenomena tersebut dari sudut teori akuntansi serta tantangan akuntansi dalam mengukur dan memverifikasi informasi non-keuangan pada era transisi menuju ekonomi rendah karbon. Hasil studi literatur dan teoritis menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan harus diatur sedemikian rupa sehingga bukan hanya sebagai persyaratan kepatuhan administratif karena sering kali dianggap kurang relevan dengan strategi perusahaan. Selain itu, diperlukan adanya penekanan terhadap pentingnya struktur tata kelola dan standar audit laporan keberlanjutan (seperti PSPK 1 dan PSPK 2) untuk mendorong pelaporan yang benar-benar akuntabel sehingga memiliki dampak yang nyata terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kata kunci: Teori Akuntansi; ESG; Laporan Keberlanjutan; PSPK 1; PSPK 2

PENDAHULUAN

Konsep keberlanjutan menjadi bagian yang penting dalam praktik bisnis dan pelaporan korporasi global. Penilaian terhadap perusahaan tidak lagi berfokus

semata pada kinerja keuangan, tetapi juga pada dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya. Pergeseran paradigma ini mencerminkan meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan penciptaan nilai jangka panjang, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan *stakeholder-oriented* yang menempatkan kepentingan berbagai pihak sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan (Freeman, 1984).

Pada konteks tersebut, pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai sarana komunikasi strategis yang memungkinkan perusahaan menunjukkan keselarasan antara aktivitas operasional dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Perspektif legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan cenderung menyesuaikan praktik dan pengungkapan informasinya untuk memperoleh penerimaan sosial serta menjaga keberlanjutan eksistensinya di tengah masyarakat (Deegan, 2019). Oleh karena itu, pengungkapan ESG tidak hanya dipandang sebagai kewajiban pelaporan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi legitimasi perusahaan.

Di Indonesia, tuntutan terhadap transparansi keberlanjutan diperkuat melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Regulasi ini menegaskan peran akuntansi dalam memperluas fungsi pelaporan dari sekadar informasi keuangan menjadi sarana akuntabilitas atas dampak lingkungan dan sosial. Namun demikian, praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia masih menunjukkan variasi kualitas pengungkapan yang cukup signifikan, sehingga memunculkan keraguan terhadap kredibilitas informasi ESG yang disajikan (Cahyandari & Hermawan, 2025).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan lebih didorong oleh tekanan eksternal dibandingkan komitmen internal, pengungkapan yang dihasilkan cenderung bersifat simbolik. Hal ini sejalan dengan temuan Hassanein et al. (2024) yang menunjukkan bahwa faktor budaya dan struktur tata kelola dapat mendorong perusahaan melakukan pelaporan keberlanjutan untuk tujuan legitimasi sosial. Kondisi serupa juga diidentifikasi oleh Dissanayake et al. (2021), yang menemukan bahwa tekanan investor dan institusi keuangan menjadi pendorong utama adopsi standar keberlanjutan.

Berdasarkan situasi tersebut, peran profesi akuntan menjadi krusial untuk memastikan keandalan dan integritas informasi non-keuangan yang dilaporkan. Kualitas pelaporan keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh standar yang digunakan, tetapi juga oleh kapasitas internal perusahaan dan infrastruktur informasi yang mendukung proses pengumpulan serta pengolahan data keberlanjutan (Troshani & Rowbottom, 2024). Oleh karena itu, penerapan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan PSPK 1 dan PSPK 2 menjadi relevan sebagai kerangka profesional bagi akuntan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Legitimasi merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara organisasi dan masyarakat tempat organisasi tersebut beroperasi. Menurut Deegan (2002), perusahaan perlu mempertahankan "kontrak sosial" dengan masyarakat dengan cara menjalankan operasional yang sesuai dengan norma, nilai, dan harapan sosial yang berlaku. Pada konteks pelaporan keberlanjutan, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan melakukan pelaporan ESG sebagai bentuk pencitraan agar tetap memperoleh legitimasi sosial dan keberlanjutan eksistensinya. Praktik pelaporan keberlanjutan sering kali digunakan sebagai strategi manajemen untuk memelihara atau memperbaiki citra publik perusahaan, terutama dalam menghadapi tekanan dari masyarakat atau peristiwa negatif yang mencoreng reputasi. Pada konteks ini, pelaporan ESG bukan sekadar bentuk akuntabilitas, melainkan juga alat legitimasi untuk mempertahankan hubungan baik dengan publik.

Teori Stakeholder menekankan pentingnya memperhatikan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan terhadap operasional perusahaan, tidak terbatas pada pemegang saham saja (Freeman, 1984). Pada kerangka ini, pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan para stakeholder, seperti pelanggan, karyawan, pemerintah, komunitas lokal, dan investor. Pelaporan ESG memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing stakeholder untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, kualitas dan kredibilitas informasi dalam laporan keberlanjutan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan para pemangku kepentingan.

PSPK 1 dan PSPK 2 memiliki peran *assurance* atas laporan keberlanjutan sebagai kerangka pengungkapan informasi yang menjadi dasar bagi proses *assurance*. PSPK 1 mengatur struktur pengungkapan yang mencakup tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik & target yang relevan secara finansial terhadap isu keberlanjutan (Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia, 2024a). PSPK 2 menambahkan fokus khusus pada isu iklim seperti emisi gas rumah kaca (GRK), strategi mitigasi, dan ketahanan terhadap skenario iklim (Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia, 2024b). Penetapan konten pengungkapan yang konsisten dan komprehensif, PSPK 1 dan PSPK 2 berfungsi sebagai kriteria pelaporan yang layak dijadikan basis penilaian dalam kegiatan *assurance*. Standar yang jelas membantu penyedia *assurance* untuk merancang prosedur verifikasi yang relevan, sistematis, dan terukur atas informasi yang disajikan. Hal tersebut penting karena standar *assurance* memerlukan "suitable criteria" atau kriteria yang memadai sebagai basis evaluasi dalam *engagement assurance*.

Hadirnya PSPK 1 dan PSPK 2 membantu memperkuat kredibilitas laporan keberlanjutan karena menyediakan struktur pengungkapan yang terintegrasi dengan laporan keuangan, memenuhi prinsip materialitas finansial yang relevan bagi penerima laporan, dan mencakup elemen risiko dan peluang keberlanjutan yang signifikan. Kerangka standar ini menyediakan benchmark bagi *assurance practitioners* dalam menilai apakah laporan telah diungkapkan secara wajar sesuai

prinsip materiil yang ditetapkan, serta apakah pengendalian internal atas data relevan telah memadai. PSPK 1 dan PSPK 2 dapat dipandang sebagai reporting criteria yang layak untuk aktivitas sustainability assurance. Kriteria pelaporan yang kuat, terstandarisasi, dan dapat diukur adalah prasyarat utama agar engagement assurance memberikan keyakinan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. PSPK membantu menyediakan struktur pengungkapan yang konsisten untuk informasi keberlanjutan, dasar yang setara untuk penilaian materialitas, dan arahan yang memungkinkan pihak assurer menilai proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon menempatkan akuntansi dalam posisi strategis. Fungsi akuntansi berkembang dari sekadar pencatatan transaksi keuangan menjadi pengukuran dan pelaporan nilai sosial serta lingkungan. Dalam konteks ini, akuntan memiliki peran penting dalam menyusun, mengaudit, dan mengkomunikasikan informasi ESG yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan dan regulator.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (literature review) dengan mengumpulkan dan mengevaluasi data penelitian untuk menganalisis penerapan laporan keberlanjutan di Indonesia. Artikel penelitian bersumber dari jurnal internasional, seperti Scopus dan ProQuest. Jurnal penelitian yang sesuai dengan tema laporan keberlanjutan dan ESG digali mengenai konsep, teori, serta temuan empiris dari berbagai penelitian terdahulu untuk kemudian disintesis menjadi kerangka analisis yang relevan bagi penerapan laporan keberlanjutan berdasarkan PSPK 1 dan PSPK 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dukungan standar seperti PSPK 1 dan PSPK 2, profesi akuntansi diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan informasi keberlanjutan yang kredibel, terverifikasi, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kontribusi sektor bisnis terhadap mitigasi perubahan iklim.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan pelaporan keberlanjutan dipengaruhi oleh beberapa faktor kombinasi antara kapabilitas internal, tata kelola perusahaan, serta kepemimpinan yang berorientasi lingkungan. Penelitian dari Bryan (2022) menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan belum terintegrasi dengan strategi, anggaran, dan pelaporan kinerja di Uni Eropa serta adanya persepsi bahwa pelaporan keberlanjutan menambah beban administratif dan tidak adanya indikator yang relevan. Sistem pelaporan saat ini masih terpisah antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan, sehingga sulit menciptakan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerangka kerja terpadu (*integrated framework*) yang menyatukan data keuangan, sosial, dan lingkungan agar keputusan bisnis dapat lebih berorientasi

pada nilai jangka panjang Abeysekera (2022). Hasil penelitian dari Dissanayake et al. (2021) menunjukkan bahwa perusahaan lebih cenderung mengadopsi SASB ketika menghadapi tekanan dari investor institusional, lembaga keuangan, atau aktivis ESG. Artinya, motivasi utama adopsi bukan karena kewajiban etis, melainkan untuk mempertahankan legitimasi sosial dan kepercayaan pasar modal. Lain hal dengan penelitian dari Hassanein et al. (2024) yang meneliti tentang budaya negara dan praktik keberlanjutan menunjukkan hasil bahwa di negara dengan tingkat *individualism* dan *power distance* tinggi, perusahaan lebih cenderung melakukan pelaporan SDGs secara simbolik, hanya untuk legitimasi sosial. Sebaliknya, di negara yang menekankan kolaborasi dan tanggung jawab sosial, pelaporan SDGs cenderung lebih substantif dan strategis. Penelitian Troshani & Rowbottom (2024) menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan bukan hanya hasil dari tekanan eksternal (regulasi, standar, pemangku kepentingan), tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas internal perusahaan dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengintegrasikan data keberlanjutan.

Vitale et al. (2025) menemukan bahwa *mandatory sustainability reporting* secara signifikan meningkatkan kinerja ESG, terutama bila didukung oleh keragaman gender dewan dan intensitas rapat, meskipun kombinasi dengan sistem insentif dapat menurunkan orientasi keberlanjutan. Gombkötő et al. (2025) menegaskan bahwa kualitas pelaporan keberlanjutan di industri pangan Hungaria berbeda antar subsektor dan berkorelasi positif dengan kinerja keuangan serta kesiapan menghadapi regulasi *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. Sejalan dengan itu, Kuceba (2025) menunjukkan bahwa penerapan pelaporan ESG yang transparan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat reputasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Sementara itu, Hernandez Aros et al. (2025) menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan di sektor konstruksi masih belum terstandardisasi, dengan tantangan biaya dan resistensi budaya, namun berpotensi mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* bila diintegrasikan dalam strategi bisnis. Galvao et al. (2025) melalui studi pada pelabuhan di Brasil menunjukkan bahwa penerapan ESG melalui model “6Ps” mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing sekaligus memperkuat dimensi sosial dan lingkungan. Adapun Grau et al. (2025) membuktikan bahwa pelaporan ESG, keterlibatan pemangku kepentingan, dan keragaman gender dewan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, dengan efektivitas yang bergantung pada tingkat independensi dewan dan sistem keuangan negara.

Berdasarkan penelitian Pratama et al. (2022) menemukan bahwa organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan membutuhkan kapabilitas utama seperti inovasi, kolaborasi, dan orientasi terhadap pemangku kepentingan agar dapat menjalankan prinsip *Triple Bottom Line* secara nyata. Penelitian oleh Adamu & Tyasari (2022) menunjukkan bahwa ukuran dewan dan keberagaman gender memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keberlanjutan sosial, sedangkan keberadaan direktur non-eksekutif tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menegaskan

bahwa struktur dewan yang lebih besar dan beragam dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sosial perusahaan.

Sementara itu, Cahyandari & Hermawan (2025) menemukan bahwa perusahaan di Indonesia menilai kinerja keberlanjutan melalui dua arah, yaitu dari faktor eksternal seperti tekanan investor dan risiko keuangan (*outside-in perspective*), serta dari kemampuan internal untuk menciptakan dampak sosial (*inside-out perspective*). Namun, masih terdapat kesenjangan antara komitmen keberlanjutan dalam laporan dan praktik di lapangan. Penelitian lain oleh Soegieharto et al. (2025) menunjukkan bahwa *Green Supply Chain Management* berhubungan positif dengan *Green Innovation*, yang berdampak pada peningkatan efisiensi, daya saing, dan kinerja lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa inovasi hijau dan pembelajaran antarorganisasi merupakan faktor penting dalam memperkuat kinerja keberlanjutan.

Selain itu, Ramadana et al. (2025) menemukan bahwa kemampuan manajerial dan pengalaman internasional dewan berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan, serta diperkuat oleh keberadaan *green CEO*. Kepemimpinan yang berorientasi lingkungan mampu memastikan strategi keberlanjutan diimplementasikan secara konsisten dalam kegiatan operasional perusahaan. Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas pelaporan keberlanjutan dan implementasi ESG ditentukan oleh dua dimensi utama, yaitu faktor eksternal seperti tekanan regulasi dan tata kelola (*outside-in*), serta faktor internal seperti kemampuan manajerial, inovasi, dan kepemimpinan beretika (*inside-out*). Integrasi antara kedua perspektif ini menjadi kunci agar pelaporan keberlanjutan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan tanggung jawab sosial dan moral perusahaan terhadap pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nguyen et al. (2025) menunjukkan bahwa praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak selalu berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan, namun pengaruh positifnya dapat meningkat apabila perusahaan dipimpin oleh CEO yang memiliki popularitas tinggi atau dikenal publik (*CEO celebrity*). Dalam konteks industri restoran di Amerika Serikat, karakteristik kepemimpinan ini memperkuat legitimasi dan kredibilitas inisiatif keberlanjutan yang dijalankan, sehingga meningkatkan persepsi positif pemangku kepentingan dan pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian oleh Wu et al. (2025) berfokus pada penerapan prinsip ESG di Tiongkok dan kaitannya dengan ketimpangan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka ESG mampu mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah. Ketimpangan sosial dan ekonomi antar daerah justru dapat meningkat apabila kebijakan ESG tidak disesuaikan dengan kondisi lokal. Penelitian ini menekankan bahwa ESG seharusnya tidak hanya diarahkan pada tujuan lingkungan dan tata kelola, tetapi juga harus menjadi sarana pemerataan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Carolina et al. (2023) di Korea Selatan menemukan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan ESG mampu

menurunkan risiko kejatuhan harga saham (*stock price crash risk*). Namun, efek mitigasi ini tidak terlihat selama masa krisis COVID-19. Dengan menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Korea dari tahun 2012 hingga 2021, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dimensi lingkungan dan tata kelola lebih dominan dalam menurunkan risiko tersebut dibandingkan aspek sosial. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa ESG berperan sebagai alat mitigasi risiko jangka panjang, meskipun efektivitasnya dapat menurun saat terjadi krisis ekonomi.

Xia et al. (2025) meneliti keterkaitan antara *Environmental Management Accounting* (EMA) dan *Carbon Emission Management* (CEM) terhadap kinerja ESG pada sektor manufaktur di Bangladesh. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan praktik EMA seperti *eco-efficiency improvement*, *environmental cost tracking*, dan *life cycle assessment* berpengaruh positif terhadap kinerja ESG perusahaan. Selain itu, CEM memperkuat hubungan tersebut dengan mendorong perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola sumber daya dan menekan emisi karbon. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi sistem akuntansi lingkungan dalam strategi bisnis untuk mencapai keberlanjutan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Suta et al. (2025) di kawasan Eropa Tengah dan Timur menilai kesiapan perusahaan dalam memenuhi *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS). Melalui analisis teks otomatis terhadap laporan keberlanjutan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki tingkat pengungkapan ESG yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Fokus pelaporan masih didominasi oleh aspek lingkungan, khususnya perubahan iklim, sementara aspek sosial dan tata kelola relatif kurang diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaporan ESG meningkat secara kuantitas, keseimbangan antar dimensi ESG masih perlu diperbaiki.

Penelitian terakhir oleh Bogdan et al. (2025) mengkaji hubungan antara pengungkapan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence disclosure*), kualitas pelaporan keuangan, dan skor ESG pada perusahaan publik di Rumania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam penggunaan teknologi AI berhubungan positif dengan tingkat likuiditas perusahaan, namun berkorelasi negatif dengan laba bersih. Selain itu, terdapat hubungan dinamis antara pengungkapan AI, kualitas laporan keuangan, dan kinerja ESG. Hal ini menandakan bahwa inovasi teknologi dapat memengaruhi persepsi keberlanjutan dan tata kelola, serta menjadi faktor baru dalam penciptaan nilai berkelanjutan perusahaan.

Pada perspektif teori legitimasi, pelaporan ESG dapat berfungsi sebagai mekanisme perusahaan untuk mempertahankan kesesuaian dengan nilai dan ekspektasi sosial yang berkembang (Deegan, 2002). Namun tanpa kerangka pengungkapan dan verifikasi yang jelas, pelaporan ESG berisiko menjadi praktik simbolik atau *window dressing* terutama ketika dilakukan untuk merespon tekanan regulator dan investor. Teori *stakeholder* memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memprioritaskan kebutuhan *stakeholder* dominan sehingga informasi ESG yang disajikan belum tentu mencerminkan akuntabilitas substantif kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks ini, PSPK 1 dan PSPK 2 berperan penting sebagai standar pengungkapan yang membatasi ruang diskresi manajerial dengan mewajibkan pengungkapan terstruktur terkait tata kelola, strategi, manajemen risiko serta metrik dan target keberlanjutan termasuk risiko iklim. Keberadaan standar ini memperkuat legitimasi pelaporan ESG melalui mekanisme akuntabilitas yang lebih terukur dan dapat diuji.

Pengukuran nilai sosial dan lingkungan merupakan tantangan utama dalam akuntansi keberlanjutan karena sifatnya yang multidimensi, kontekstual dan sering kali tidak memiliki ukuran kuantitatif yang baku. Tanpa kriteria yang jelas, informasi non keuangan rentan terhadap subjektivitas dan bias manajerial sehingga melemahkan kredibilitas pelaporan ESG. PSPK 1 dan PSPK 2 memberikan kontribusi penting dengan menetapkan kriteria pengungkapan yang konsisten dan berorientasi pada materialitas finansial sehingga informasi keberlanjutan dapat dievaluasi secara sistematis dalam proses *assurance*. Dengan adanya standar ini, nilai sosial dan lingkungan tidak hanya diungkapkan secara naratif tetapi juga dikaitkan dengan risiko peluang dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan keterbandingan antar entitas.

Pada transisi menuju ekonomi rendah karbon, akuntansi memerankan peran strategis sebagai alat untuk mengukur, mengelola dan mengkomunikasikan risiko serta peluang terkait perubahan iklim. PSPK 2 secara khusus menempatkan isu iklim sebagai bagian integral dari pelaporan keberlanjutan dengan menuntut pengungkapan emisi gas rumah kaca, strategi mitigasi dan ketahanan perusahaan terhadap scenario iklim. Hal ini memperluas fungsi akuntansi dari sekedar pencatatan historis menjadi instrument pengambilan keputusan yang berorientasi masa depan. Dengan demikian, penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 tidak hanya memperkuat kualitas pelaporan ESG, tetapi juga mendukung peran akuntansi dalam mendorong perubahan perilaku organisasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap agenda ekonomi rendah karbon.

Kasus yang dilayangkan TuK INDONESIA di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada November 2024 menuduh Bank Mandiri melakukan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip ESG, khususnya dalam aktivitas pembiayaan kepada perusahaan perkebunan sawit PT Astra Agro Lestari (AAL) dan anak perusahaannya, PT Agro Nusa Abadi (ANA). Bank Mandiri selama ini mengklaim sebagai "*Indonesia's First Movers on Sustainable Banking*", menjadi pelopor dalam penerapan praktik perbankan berkelanjutan. Namun, pada kasus ini diketahui bahwa bank tersebut menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang terlibat dalam perusakan lingkungan, konflik agraria, dan pelanggaran hak asasi manusia sehingga menunjukkan adanya ketimpangan antara komitmen keberlanjutan yang dilaporkan dan praktik bisnis yang dijalankan (Helindro, 2025). Kasus ini relevan dengan implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 karena laporan keberlanjutan seharusnya menggambarkan secara jujur dan komprehensif dampak sosial serta lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan, termasuk dari kegiatan pembiayaan atau investasi yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan PSPK 1 dan PSPK 2, laporan keberlanjutan harus memenuhi prinsip tepat waktu, keandalan, keterbandingan, dan kejelasan penyajian. Namun, dalam praktiknya, banyak laporan keberlanjutan di Indonesia, termasuk dari lembaga keuangan besar, masih berorientasi pada corporate image ketimbang evaluasi kritis atas dampak nyata pada masyarakat dan lingkungan. Kasus Bank Mandiri menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan belum mencerminkan kondisi lapangan secara transparan. Jika pembiayaan terhadap AAL benar dilakukan meskipun perusahaan tersebut memiliki latar belakang pelanggaran lingkungan, maka hal ini menandakan adanya kesenjangan antara dokumen pelaporan dan praktik operasional. Laporan keberlanjutan yang hanya menampilkan data positif seperti jumlah proyek hijau yang didanai tanpa mengungkap potensi risiko sosial-lingkungan dari pembiayaan tertentu berpotensi menjadi bentuk greenwashing — yaitu pelaporan hijau yang menyesatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keberlanjutan masih bersifat deklaratif dan belum berbasis pada data yang komprehensif dan dapat diverifikasi secara independen. Oleh sebab itu, kualitas laporan keberlanjutan masih perlu ditingkatkan, bukan hanya dari sisi format dan data, tetapi juga dari sisi substansi dan akuntabilitas moral perusahaan.

Konsistensi merupakan aspek penting dalam PSPK 1 dan PSPK 2 yang mengharuskan entitas pelapor menjaga kesesuaian antara komitmen keberlanjutan yang dinyatakan dan pelaksanaan kebijakan yang ada di lapangan. Pada kasus ini, Bank Mandiri menghadapi gugatan karena dianggap gagal mempertahankan konsistensi tersebut. Klaim sebagai lembaga keuangan yang mengedepankan prinsip ESG akan kehilangan legitimasi ketika praktik pembiayaan justru memperburuk kondisi sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu, Bank Mandiri seharusnya melakukan due diligence ESG yang lebih ketat terhadap penerima pembiayaan, termasuk menilai risiko lingkungan dan sosial dari proyek yang dibiayai. Ketidakhadiran bank dalam sidang perdana kasus ini juga memperkuat persepsi publik bahwa komitmen keberlanjutan masih belum sepenuhnya menjadi prioritas etika institusi.

PSPK 1 dan PSPK 2 juga menekankan pentingnya proses verifikasi independen (*assurance*) untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan akurat dan dapat dipercaya. Pada kasus ini, Bank Mandiri menimbulkan suatu pertanyaan apakah laporan keberlanjutan yang disusun telah melalui proses audit independen yang kredibel. Minimnya mekanisme verifikasi eksternal di Indonesia membuka ruang bagi distorsi informasi dan klaim keberlanjutan yang tidak berdasar. Kurangnya mekanisme audit ESG eksternal di Indonesia mengakibatkan rendahnya akuntabilitas publik, dan menimbulkan potensi pelanggaran etika pelaporan. Lembaga keuangan perlu melibatkan pihak ketiga yang independen dalam proses verifikasi, sehingga laporan yang dihasilkan memiliki kredibilitas lebih tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang mendorong audit independen dari pihak ketiga yang objektif agar laporan keberlanjutan dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus ini memberikan sejumlah implikasi penting terhadap penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 di Indonesia, yaitu bagi OJK dan regulator, diperlukan penguatan sistem pengawasan agar laporan keberlanjutan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-

benar mencerminkan dampak sosial-lingkungan perusahaan. Bagi perusahaan dan lembaga keuangan, kasus ini menjadi peringatan bahwa reputasi ESG tidak dapat dibangun hanya melalui dokumen pelaporan, tetapi harus ditunjukkan melalui konsistensi antara nilai, kebijakan, dan tindakan yang nyata. Sedangkan bagi masyarakat dan investor, meningkatnya kesadaran terhadap isu keberlanjutan menuntut adanya laporan yang transparan, terverifikasi, dan dapat dipercaya, bukan sekadar klaim yang bersifat simbolik. OJK bersama UNEP Finance Initiative (UNEP FI) telah berupaya meningkatkan kesadaran publik dan pelaku industri terhadap bahaya greenwashing melalui riset kolaboratif bertema “The Greenwashing Trap: How to Build Public Awareness” (Rachman, 2024). Langkah ini menunjukkan keseriusan regulator dalam memahami kompleksitas fenomena greenwashing di sektor keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut Craig Deegan laporan keberlanjutan dipandang sebagai alat legitimasi (legitimacy tool). Deegan menekankan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan bukan semata-mata untuk transparansi, tetapi untuk mempertahankan legitimasi sosial di mata pemangku kepentingan. Ketika regulasi seperti PSPK 1 dan PSPK 2 diberlakukan, perusahaan mungkin akan melakukan pelaporan secara simbolik (symbolic disclosure), yaitu mematuhi kewajiban formal namun belum tentu mencerminkan kinerja keberlanjutan yang sesungguhnya.

Pelaporan keberlanjutan atau ESG (Environmental, Social, and Governance) telah menjadi bagian penting dalam tata kelola perusahaan modern, terutama dalam menjawab tuntutan akuntabilitas sosial dan lingkungan dari para pemangku kepentingan. Di Indonesia, kewajiban pelaporan keberlanjutan telah diatur melalui POJK No. 51/POJK.03/2017. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kualitas, konsistensi, dan kredibilitas informasi yang disampaikan.

PSPK 1 dan PSPK 2 memberikan kerangka standar bagi jasa asurans atas informasi non-keuangan seperti laporan keberlanjutan. Keberadaan standar ini penting untuk meningkatkan keandalan data ESG melalui verifikasi independen. Meski demikian, penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 masih terbatas karena belum meratanya kompetensi auditor terhadap isu keberlanjutan, serta belum adanya standar pengukuran ESG yang baku. Selain itu penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 masih dalam tahap awal dengan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.

Secara teoritis, pelaporan keberlanjutan dapat dijelaskan melalui Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berupaya memenuhi regulasi, tetapi juga menjaga citra sosial dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Pada era transisi menuju ekonomi rendah karbon, akuntansi dituntut untuk tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga mengukur dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan perusahaan secara akuntabel dan transparan. Berdasarkan penelitian dari Alsayegh et al., (2023), pelaporan keberlanjutan harus diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola nasional

dan tidak cukup hanya bersifat kepatuhan administratif sehingga verifikasi, partisipasi stakeholder, dan transformasi kelembagaan diperlukan agar sustainability report benar-benar berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Sedangkan menurut Mohamed et al. (2025), sustainability reporting berkembang pesat secara kuantitatif, tetapi belum matang secara teoretis dan metodologis, khususnya dalam menilai kualitas, konsistensi, dan dampak nyata laporan keberlanjutan terhadap praktik bisnis beretika dan keberlanjutan jangka panjang.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan analisis tinjauan literatur, yaitu mendorong peningkatan kompetensi auditor dan akuntan diperlukan pelatihan khusus bagi auditor dan akuntan mengenai isu ESG, termasuk pemahaman terhadap indikator keberlanjutan, standar internasional (seperti GRI, SASB, ISSB), serta metodologi assurance untuk informasi non-keuangan. Penyusunan standar ESG yang terintegrasi otoritas terkait, seperti OJK dan IAI, perlu mendorong pengembangan standar atau pedoman nasional yang lebih terperinci mengenai pengukuran dan pengungkapan data ESG agar tercipta konsistensi dan komparabilitas antar perusahaan. Penguatan sistem pengendalian internal atas data non-keuangan perusahaan perlu membangun sistem pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data ESG yang andal dan terdokumentasi dengan baik agar proses verifikasi dan assurance berjalan lebih efektif. Mendukung pelaporan keberlanjutan yang substantif dan harus diarahkan pada pelaporan yang bermakna, bukan sekadar formalitas administratif. Perusahaan perlu menjadikan ESG reporting sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Serta adanya kolaborasi multi pihak dalam transisi ke ekonomi rendah karbon. Pemerintah, perusahaan, akademisi, dan profesi akuntansi harus berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem pelaporan keberlanjutan yang mendorong inovasi, akuntabilitas, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. (2022). A framework for sustainability reporting. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(6), 1386–1409. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2021-0316>
- Adamu, A. I., & Tyasari, I. (2022). Social Sustainability Reporting and Board Structures in the Healthcare Industry. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.28992/ijsam.v6i1.485>
- Alsayegh, M. F., Ditta, A., Mahmood, Z., & Kouser, R. (2023). The Role of Sustainability Reporting and Governance in Achieving Sustainable Development Goals: An International Investigation. *Sustainability (Switzerland)*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/su15043531>
- Bogdan, V., Hațegan, C. D., Török, R. M., Blidișel, R. G., Popa, D. N., & Pitorac, R. I. (2025). Driving Sustainable Value. The Dynamic Interplay Between Artificial Intelligence Disclosure, Financial Reporting Quality, and ESG Scores. *Electronics (Switzerland)*, 14(16), 1–26. <https://doi.org/10.3390/electronics14163247>
- Bryan, K. (2022). Sustainability reporting at EU level: leading by example? *Journal of*

- Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(3), 488–497. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2021-0083>
- Cahyandari, E., & Hermawan, S. M. (2025). Outside-In and Inside-Out Perspectives: An Analysis of ESG's Social Dimension in Indonesian Air Navigation Company. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(2), 153–164. <https://doi.org/10.9744/jak.27.2.153-164>
- Carolina, V., Gunawan, Y., & Tedy, R. (2023). Can ESG Performance Moderate The Effect of Tax Avoidance on Corporate Risk? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 63–71. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i1.21687>
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures – A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia. (2024a). *PSPK 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia. (2024b). *PSPK 2: Pengungkapan Terkait Iklim*. Ikatan Akuntan Indonesia. <http://shop.ifrs.org>.
- Dissanayake, D., Tilt, C. A., & Qian, W. (2021). How do public companies respond to national challenges through sustainability reporting? – The case of Sri Lanka. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 18(4–5), 455–483. <https://doi.org/10.1108/QRAM-06-2020-0088>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Galvao, C. B., Robles, L. T., Cutrim, S. S., & Lamarca, R. (2025). Best practices in ESG: a benchmarking for Brazilian seaports sustainability journey. *Journal of Shipping and Trade*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s41072-025-00206-2>
- Gombkötő, N., Hámori, J., Rózsa, A., Troján, S., Hegyi, J., Lámfalusi, I., & Kacz, K. (2025). Sustainability reporting practices of Hungarian food subsectors from EU taxonomy perspectives. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00926-2>
- Grau, A., Castelo-Branco, M., & Bel-Oms, I. (2025). The Impacts of ESG Reporting, Stakeholder Engagement and Board Gender Diversity on Firm Performance: Exploring the Moderating Role of Board Independence. *Business Strategy and Development*, 8(3). <https://doi.org/10.1002/bsd2.70159>
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (2010). *Accounting & accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting* (2nd ed.). Routledge.
- Hassanein, A., Bani-Mustafa, A., & Nimer, K. (2024). A country's culture and reporting of sustainability practices in energy industries: does a corporate sustainability committee matter? *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1).

<https://doi.org/10.1057/s41599-024-03536-x>

- Helindro, G. (2025, June 20). Sahabat Pengadilan Dukung TuK Indonesia Gugat Bank Mandiri. *Betahita.Id*.
- Hernandez Aros, L., Buitrago Mejia, A., Binns Hernández, H. A., & Gutierrez Portela, F. (2025). Sustainability reporting in the construction sector: trends, models, metrics and challenges towards achieving the SDGs. *Research in Globalization*, 11(July). <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2025.100300>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 3000 (Revisi 2013): Jasa Asurans Selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kolk, A. (2003). Trends in sustainability reporting by the Fortune Global 250. *Business Strategy and the Environment*, 12(5), 279–291. <https://doi.org/10.1002/bse.370>
- Kuçeba, R. (2025). the Impact of Esg Reporting on the Multidimensional Activities of Modern Companies. *System Safety: Human - Technical Facility - Environment*, 7(1), 19–28. <https://doi.org/10.2478/czoto-2025-0003>
- Mohamed, A. I., Awale, A. A., & Mohamed, M. I. (2025). Sustainability Reporting Academic Research: A Bibliometric Trends and Future Directions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(2), 106–112. <https://doi.org/10.32479/ijefi.17675>
- Nguyen, N. T., Kim, B., & Song, H. J. (2026). The dynamics of sustainability: CEO celebrity as a moderator on the ESG and firm performance relationship in the restaurant industry. *International Journal of Hospitality Management*, 132(August 2024), 104353. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2025.104353>
- O'Dwyer, B., Owen, D., & Unerman, J. (2011). Seeking legitimacy for new assurance forms: The case of assurance on sustainability reporting. *Accounting, Organizations and Society*, 36(1), 31–52. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2011.01.002>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik*. <https://www.ojk.go.id>
- Pratama, V. P., Gustomo, A., & Ghazali, A. (2022). Sustainability-Driven Enterprise: A Literature Review on Organizational Capabilities. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.28992/ijsam.v6i1.587>
- Rachman, V. (2024, February 10). OJK Gencarkan Sinergi untuk Cegah Aksi Tipu-Tipu Greenwashing. *SWA.Co.Id*.
- Ramadana, M., Hidayah, Y., & Karina, R. (2025). Driving Sustainability: The Role of Managerial Ability and Board Characteristics with Green CEO as a Moderator. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(2), 140–152. <https://doi.org/10.9744/jak.27.2.140-152>
- Soegieharto, D. H., Rosdini, D., & Sukmadilaga, C. (2025). Green Innovation: A Meta-Analytic Exploration of Green Supply Chain and Knowledge Sharing Dynamics.

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 26(2), 142–160.
<https://doi.org/10.9744/jak.26.2.142-160>

Suta, A., Molnár, P., Limbach, Z., & Tóth, Á. (2025). Dictionary-based assessment of European Sustainability Reporting Standard (ESRS) disclosure topics. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00930-6>

Troshani, I., & Rowbottom, N. (2024). Corporate sustainability reporting and information infrastructure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 37(4), 1209–1237. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2023-6244>

Vitale, G., Cupertino, S., Schiuma, G., & Troise, C. (2025). Investigating How Mandatory Sustainability Reporting Influences Corporate Governance Effects on ESG Performance: From Obligation to Impact for Sustainable Development. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 32(5), 6261–6282. <https://doi.org/10.1002/csr.70025>

Wu, T., Zhang, H., Ji, M., & Zhang, R. (2026). Social inequality: Practicing environmental, social and governance principle in China. *Environmental Impact Assessment Review*, 116(June 2025), 108069. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2025.108069>

Xia, L., Fatema, N., Rahman, M. M., & Hossain, A. (2025). Nexus of environmental management accounting, and carbon emission management on environmental, social, and governance performance: evidence from symmetrical and asymmetrical approach. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05465-9>